



Analisis Konflik Politik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Lukman Rais^{1*}, Umar Ramli², Wahyudin Halik³

Uswatul Mardiyah⁴, Nur Hidayah⁵

^{1,2,3,4&5}Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

*Email: Lukmanrais28@gmail.com

Abstract : *This research aims at analyzing causes and impacts of political conflicts, as well as changes in the governance structure and conditions following the establishment of new autonomous regions. The study employs a mixed methods approach using an exploratory sequential design. The research is conducted in Sorong City, Southwest West Papua Province, utilizing cluster random sampling. Data collection techniques involve questionnaires, observations, interviews, document analysis, and triangulation. Data analysis follows an explanatory sequential mixed methods approach, involving descriptive statistical analysis and qualitative analysis. The research findings indicate that the causes of political conflict are attributed to changes in regional governance and power redistribution stemming from polarization based on social and cultural differences, as well as differences in political views and ideologies leading to conflicts among elite political parties competing for power. The impact of these conflicts has resulted in the instability of governance and hindered government decision-making, prompting government efforts to address these issues through dialogue and communication, with civil society playing a role as pressure groups and peace agents. Furthermore, there have been no structural changes in governance because the new autonomy policy primarily aims at political objectives to mitigate conflicts, with economic and administrative goals not yet being the primary focus. Additionally, the condition of governance is in the process of improvement as the new government is engaged in restructuring and infrastructure development, thus making the governance condition currently unstable.*

Keywords: *Political Conflict; Changes In Government Structure And Conditions; And The Formation Of New Autonomous Regions.*

A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memiliki peran penting dalam perkembangan pemerintahan Indonesia karena memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi serta menerapkan solusi yang paling sesuai dalam menangani masalah administrasi pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mewakili dan memajukan kepentingan masyarakat daerah yang mereka wakili (Petronela & Irina, 2009). Sehingga isu pemekaran wilayah yang lebih dikenal sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat krusial dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia yang selama ini tertinggal dari daerah lainnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua dengan pengesahan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid II dengan konsensusnya pengesahan wilayah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya pada 9 Desember 2022. Pasca

pengesahan terjadi pro dan kontra di masyarakat karena dinilai hanya kebijakan politis untuk meredakan konflik yang tidak kunjung usai sementara pembentukan daerah otonomi baru perlu perencanaan dan kebijakan komprehensif dari segala aspek karena kompleksitas masalah, sehingga pada akhirnya melahirkan masalah baru di kemudian hari.

Pemekaran daerah diyakini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan wilayah. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pemekaran wilayah tidak selalu berjalan lancar. Sebaliknya, seringkali pemekaran daerah disertai dengan konflik baru antar daerah. Ketika wilayah semakin meluas, risiko terjadinya konflik spasial yang berkaitan dengan masalah kependudukan dan batas wilayah juga semakin besar. Konflik wilayah yang muncul akibat pemekaran wilayah dapat memiliki dampak ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang signifikan (Muksin et al.,2021). Sementara itu pemerintahan baru justru menambah masalah sosial, memperpanjang kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang menjadi perhatian, apakah dalam pemekaran wilayah baru dapat mengurangi angka kemiskinan di Papua Barat Daya (dulu masih Papua Barat) nantinya, dimana pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Papua Barat adalah sekitar 214,98 ribu orang (BPS Papua Barat, 2023).

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan pembentukan daerah otonomi baru tidak berjalan dengan efektif karena didominasi oleh kepentingan politik sehingga tidak menciptakan perubahan yang diinginkan (Muqoyyidin, 2016). Pemerintahan baru dengan segala aspek politis yang ada tentunya terdapat kekuasaan dan kelompok politik yang bertarung dalam merebut pengaruh untuk meraih kekuasaan dan membuat dinasti politik. Seharusnya dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga tidak menambah daftar kegagalan otonomi daerah sejak 1999 sampai saat ini berlanjut, dimana isu pemekaran daerah hanya sebatas *euphoria* politik semata tanpa ada perubahan yang signifikan pasca ditetapkannya, dimana peningkatan pembangunan dan akses layanan publik menjadi penting sehingga menciptakan perubahan.

Ada beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam membangun argumen dan kebaruan penelitian ini. Pada penelitian Hanantyo Sri Nugroho tahun 2018 menemukan bahwa Konflik dan praktik dinasti politik telah memunculkan perubahan dalam bentuk orang-orang berpengaruh di tingkat lokal yang mencari kekuasaan di dalam era demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Orang-orang berpengaruh ini sering kali terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Mereka berperan aktif dalam proses politik, termasuk mobilisasi pemilih, pengelolaan pemerintahan, dan kadang-kadang bahkan menghambat pengawasan terhadap pemerintahan (Nugroho,2018). Kepemimpinan elit lokal sangat berpengaruh dalam menciptakan kekuasaan apalagi jika mereka secara politik memiliki kekuatan yang bersumber dari identitas suku, agama dan budaya yang melanggengkan dinasti politik di daerah yang baru dijadikan wilayah baru.

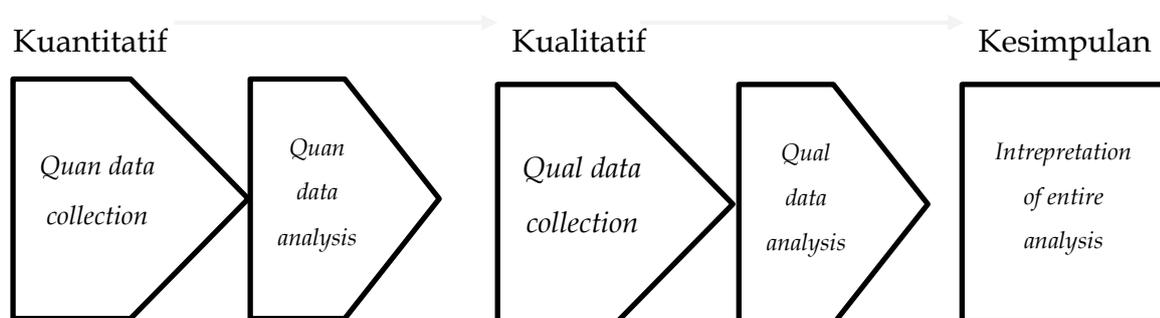
Penelitian Tue Mali tahun 2018 menemukan Konflik tanah di Nagekeo sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) muncul karena pemerintah daerah tidak sepenuhnya memahami esensi otonomi daerah sehingga cenderung tampil sebagai entitas yang otoriter, sering kali menggunakan alasan kepentingan umum sebagai kedok untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (Tue Mali,2018). Dengan wilayah baru tersebut, kepentingan selalu menjadi alasan rasional dari beberapa

individu atau kelompok menciptakan kekuasaan baru, yang sebelumnya telah ada, dilegitimasi oleh dalih pemekaran wilayah sehingga kepentingan masyarakat umum dikesampingkan.

Penelitian Haikal tahun 2019 menemukan Pemekaran wilayah melahirkan konflik atas kepemilikan tanah karena bergantung pada perspektif Hukum Adat, sementara pemekaran wilayah menggunakan hukum negara. Ada perbedaan mendasar antara Hukum Adat dengan Aturan Negara secara administratif sebagai sebuah struktur yang mengekang (*constraining*) sehingga penyelesaian konflik memerlukan instrumen khusus, seperti dikeluarkannya Ranperda Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan (Haikal,2019). Hal ini juga berpotensi di Papua, dimana tanah atau wilayah dalam pelepasannya secara adat dan hukum Negara, sehingga potensi konflik antar wilayah yang baru terbentuk itu ada.

Penelitian Reksa Burhan tahun 2020 menemukan proses pemekaran di Luwu menjadi semakin kompleks dan dinamis karena persaingan antara elit politik dan birokrasi lokal. Persaingan ini terjadi dalam konteks yang sangat terbuka, dengan partisipasi berbagai elit lokal, termasuk para politisi dan pejabat birokrasi. Akibatnya, rencana-rencana pemekaran yang seharusnya dijalankan sesuai jadwal menjadi terganggu oleh konflik kepentingan yang muncul dalam tarik-menarik elit lokal (Burhan,2020). Secara umum fokus penelitian untuk menganalisis konflik politik pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan penelitian ini menganalisis penyebab dan dampak konflik politik pasca pembentukan daerah otonomi baru serta bagaimana perubahan struktur dan kondisi pemerintahan pasca pembentukan daerah otonomi baru.

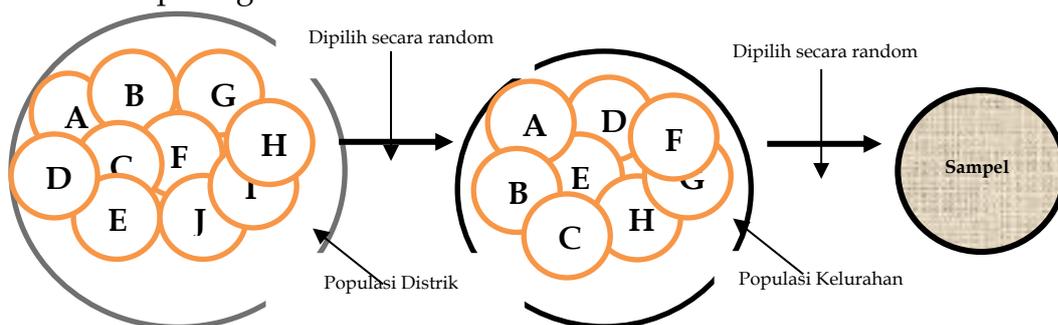
B. METODE



Gambar 1. Skema Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mix method*, yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif yang berlandaskan filsafat pragmatisme (kombinasi positivisme dan post positivisme). Metode penelitian ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif (Sugiyono,2022: 21). Desain penelitian menggunakan *exploratory sequential design* yang mengumpulkan serta menganalisis data berupa kuantitatif pada tahap pertama, kemudian pada tahap kedua mengumpulkan data kualitatif (Sugiyono,2022: 22). Hal itu dapat dilihat pada gambar satu.

Lokasi penelitian di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Populasi dan sampel penelitian dalam skema penelitian pengembangan yang digunakan adalah level satu yang bertujuan mengetahui potensi dan masalah yang ada dalam satu objek penelitian. Sehingga berdasarkan hal tersebut sampel penelitian menggunakan *probability sampling* yang memberikan peluang yang sama bagi populasi untuk menjadi sampel. Penentuan sampling penelitian menggunakan *cluster random sampling*, yaitu penentuan sampling jika proporsi wilayah yang luas sehingga secara acak dipilih sepuluh kelurahan di Kota Sorong. Dari lokasi yang terpilih selanjutnya secara acak diambil sampel sebanyak sepuluh orang responden penelitian. Hal itu bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Skema Penentuan Sampling Penelitian

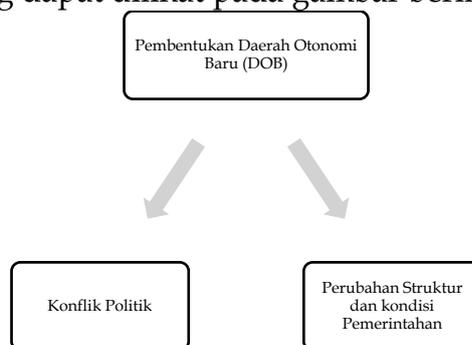
Sehingga berdasarkan hal tersebut, lokasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi dan sampel penelitian

No	Distrik	Kelurahan	Jumlah
1	Sorong Timur	Klamana	10
2	Sorong Timur	Klawuyuk	10
3	Sorong Kepulauan	Dom Barat	10
4	Sorong Kepulauan	Dom Timur	10
5	Malaimsimsa	Malaingkeci	10
6	Sorong Utara	Malanu	10
7	Sorong Barat	Klawasi	10
8	Sorong Kota	Klabala	10
9	Sorong Timur	Kladufu	10
10	Sorong Manoi	Klasabi	10
Total			100

Sumber : Olahan peneliti, 2023

Sementara itu variabel penelitian yang akan diteliti adalah pembentukan daerah otonomi baru dalam hubungannya dengan konflik politik dan perubahan struktur pemerintahan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Variabel penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner sementara pada penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi. Sehingga penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dengan tipe *explanatory sequential mixed method* dengan dua tahap, dimana pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis *statistic deskriptif* yang menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram dan perhitungan persentase, sementara pada tahap kedua melakukan analisis kualitatif dengan menganalisis dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu melakukan reduksi data, penyajian data, dan melakukan melakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono,2022: 387).

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konflik Politik

Konflik timbul sebagai akibat dari perbedaan yang tajam dan benturan kepentingan yang disebabkan oleh latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda, yang memiliki pengaruh yang kuat dalam memicu konflik. Konflik menciptakan sikap negatif terhadap suatu pihak, sistem, atau mekanisme yang ada dalam organisasi. Konflik juga menciptakan ketidakpuasan terhadap lingkungan organisasi, perasaan frustrasi, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya, yang sering kali sulit untuk diatasi karena meninggalkan kelompok berarti harus menghadapi risiko yang signifikan. Konflik juga menciptakan dorongan yang berlebihan terhadap harga diri yang mendorong keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi dalam situasi konflik (Hidayat,2009: 76). Sementara Lewis Coser (Habib,2016: 9) menjelaskan konflik sebagai perjuangan atau pertentangan yang muncul ketika individu atau kelompok bersaing untuk memperoleh nilai, pengakuan, status, kekuasaan, atau sumber daya yang langka.

Politik pada hakikatnya selalu melibatkan konflik dan persaingan antara berbagai kepentingan. Konflik biasanya muncul sebagai hasil dari perselisihan yang timbul dalam berbagai peristiwa politik. Perselisihan ini sering kali bermula dari isu-isu yang bersifat abstrak dan umum, dan kemudian berkembang dan mengalami proses menjadi konflik yang lebih spesifik dan dirasakan secara nyata (Hidayat, 2009: 124). Konflik politik berkaitan dengan unsur-unsur politik, seperti negara, pemerintah, pejabat politik, dan kebijakan publik yang mana elemen-elemen ini memainkan peran penting dan memberikan konotasi khusus (Rauf,2001: 29).

Konflik politik disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat majemuk secara kultural, sementara kemajemukan vertikal merupakan struktur masyarakat majemuk secara sosial. Konflik terjadi jika terjadi benturan kepentingan atau ada pihak yang merasa tidak diberlakukan secara tidak adil sehingga dalam kemajemukan vertikal dan horizontal tersebut menimbulkan konflik (Surbakti, 2001: 194).

2. Penyebab Konflik Politik

Pada umumnya konflik dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, dalam pada teori hubungan masyarakat, Konflik seringkali dipicu oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok dalam masyarakat. Konflik ini sering kali berasal dari ketidaksepakatan antara kelompok-kelompok tersebut. *Kedua*, dalam pada teori negosiasi prinsip, Konflik muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara posisi atau pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat.

Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik yang lebih besar. *Ketiga*, pada teori kebutuhan manusia, Konflik dapat dipicu oleh persaingan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, konflik dapat timbul. *Keempat*, pada teori identitas, Konflik seringkali terkait dengan ancaman terhadap identitas kelompok atau trauma dari masa lalu yang belum terselesaikan. Ancaman terhadap identitas bisa menjadi pemicu konflik. *Kelima*, pada teori transformasi konflik, Konflik dapat muncul karena adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketidaksetaraan ini dapat memicu konflik sosial (Fisher,2002: 7-8).

Secara khusus ada beberapa hal yang menyebabkan konflik politik, yaitu struktur politik, keterbatasan sumber daya dan jabatan serta prinsip kesenangan. Pada struktur politik, yaitu konflik politik sering kali timbul dari ketegangan antara penguasa politik (mereka yang memegang jabatan politik atau kekuasaan) dan orang-orang yang dikuasai atau diwakili oleh penguasa politik tersebut. Ini mencerminkan perbedaan kekuasaan dan kontrol dalam suatu struktur politik. Selanjutnya dengan keterbatasan sumber daya dan jabatan, seringkali menjadi sumber persaingan dan konflik. Semakin langka atau diinginkan suatu jabatan, semakin besar potensi konflik. Orang-orang bersaing untuk mendapatkan jabatan tersebut, yang dapat memicu konflik politik. Terakhir adanya prinsip kesenangan, dimana para pemegang kekuasaan politik cenderung menggunakan kekuasaan tersebut untuk meningkatkan kesenangan atau keuntungan pribadi mereka. Ketika ada pihak atau kelompok yang menentang, mengkritik, atau mengancam kepentingan atau kesenangan para pemegang kekuasaan, konflik politik dapat muncul karena upaya mempertahankan kekuasaan dan keuntungan ini (Rauf, 2001: 29).

3. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu untuk memiliki kontrol atas pengaturan, pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan urusan mereka sendiri, dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada penduduk suatu daerah untuk mengelola dan mengatur urusan-urusan mereka sendiri, sambil tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Muntoha,2004: 1).

Menurut Jim Ife (Noor,2012: 8) desentralisasi merupakan salah satu dari empat ciri khas demokrasi partisipatoris, selain akuntabilitas, edukasi, dan kewajiban, dengan tujuan menerapkan strategi yang mempromosikan keadilan sosial bagi masyarakat. Demokrasi partisipatoris membutuhkan struktur pembuatan keputusan yang tersebar secara desentralisasi, dan desentralisasi adalah bagian integral dari visi alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Demokrasi partisipatoris memerlukan struktur pembuatan keputusan yang didistribusikan secara desentralisasi, dan desentralisasi adalah elemen inti dari visi alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Meskipun dalam beberapa situasi, koordinasi atau pembuatan keputusan yang lebih terpusat mungkin diperlukan, prinsip yang dipegang adalah bahwa tidak ada keputusan atau tugas yang seharusnya diambil oleh tingkat yang lebih terpusat jika tidak perlu.

Pembentukan daerah otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama. Pertama sebagai *tujuan politik* yang Ini mencakup demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah yang bertujuan memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur urusan politik lokal mereka. Kedua sebagai *tujuan administrative* yang berkaitan dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk alokasi sumber daya keuangan. Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta pembaharuan manajemen birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Ketiga sebagai *tujuan ekonomi* yang bertujuan mencapai peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Rahayu,2018: 22).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab konflik politik

Konflik politik pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti konteks budaya, sejarah, kondisi ekonomi, dan faktor politik yang menjadi fokus penelitian. Konflik politik terbangun pasca penetapan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru pasca penetapannya pada 9 Desember 2022 sampai saat penelitian dilakukan. Konflik ini terjadi karena perebutan kepentingan dan kekuasaan yang melibatkan aktor lama dan beberapa aktor politik baru, terutama perebutan pengaruh menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Lewis Coser (Habib,2016: 9) mengatakan konflik sebagai perjuangan ketika individu atau kelompok bersaing untuk memperoleh nilai, pengakuan, status, kekuasaan. Dalam hal itu kekuasaan di daerah otonomi baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengetahuan masyarakat tentang adanya konflik politik sangat penting dalam menganalisis argumentasi penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 84 persen mengetahui adanya konflik politik. Hal itu dapat dilihat pada diagram satu.

Berdasarkan diagram tersebut, masyarakat secara umum mengetahui adanya konflik politik, terutama pada elit yang dimana konflik tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat pasca pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pasca penetapannya Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey memberikan respon dan tanggapan terhadap pernyataan mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, yang mengenai kualifikasi tokoh-tokoh yang berhak mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat Daya yang menegaskan bahwa semua tokoh yang berasal dari Papua Barat Daya berhak menjadi calon gubernur di provinsi tersebut. Provinsi ke-38 di Indonesia dianggapnya bukan milik kelompok tertentu. Hal itu menyusul pernyataan Lambert Jitmau yang menyebut bahwa hanya tiga tokoh yang layak mencalonkan diri sebagai calon gubernur, yakni dirinya sendiri, mantan Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, dan mantan Bupati Tambrauw, Gabriel Asem. Pernyataan ini mencuat karena ada beberapa pihak yang tidak terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sekarang ingin maju sebagai calon gubernur (Tribun Papua Barat, 2023). Sehingga hal tersebut memunculkan konflik politik yang berbentuk identitas. Konflik ini melahirkan ketegangan antara elit politik, apalagi menjelang persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 nantinya.



Diagram 1. Pengetahuan Tentang Adanya Konflik Politik

Sumber : Olahan data primer, 2023

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sering kali juga menjadi pemicu konflik politik di antara elit lokal. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang signifikan dalam tata kelola daerah serta redistribusi kekuasaan yang biasanya terjadi sebagai dampak dari pembentukan DOB. Tidak hanya pada tata kelola pemerintahan, konflik politik bersumber dari polarisasi yang terjadi di masyarakat atas perbedaan sosial dan budaya di masyarakat. Berdasarkan teori konflik yang dijelaskan oleh Rahman (2018: 169) yang menyatakan bahwa konflik terjadi karena persaingan untuk kekuasaan, prestise, dan juga sumber daya terbatas seperti kekayaan. Sehingga pada konflik pada ranah politik lebih disebabkan oleh persoalan identitas yang berakar dari perbedaan budaya dan pada akhirnya menciptakan perbedaan pandangan politik dan ideologi. Perbedaan latar belakang inilah yang pada akhirnya melahirkan konflik, karena dasarnya perbedaan gagasan, pandangan politik dan perebutan kekuasaan melahirkan konflik. Hal itu sesuai dengan pandangan Duverger (2015: 14) yang mengatakan konflik yang terkait politik sering kali berkisar pada perbedaan pandangan, baik itu pada tingkat individu maupun kelompok, terkait dengan masalah yang terkait dengan partai politik atau yang relevan dengan kepentingan partai politik. Ini juga bisa melibatkan masyarakat yang dianggap mewakili aspirasi rakyat. Konflik semacam ini seringkali mencakup perbedaan ideologi, dengan setiap pihak memperjuangkan ideologi partai mereka yang diyakini sebagai yang benar.

Pada penyebab konflik politik yang terjadi seperti yang dijelaskan paragraf sebelumnya tidak jauh dari perebutan kekuasaan dan perebutan sumber daya yang terbatas, seperti jabatan dan kesenangan pribadi atau golongan. Pada penelitian ditemukan factor penyebab konflik politik karena perbedaan pandangan politik dan ideologi. Hal itu dapat dilihat pada diagram dua.

Berdasarkan penelitian ditemukan penyebab utama konflik politik adalah perbedaan pandangan politik dan ideologi yang berbasis pada pertentangan antara beberapa partai politik untuk merebut kekuasaan. Seperti pada pemecatan terhadap Ketua DPC Demokrat Kota Sorong, Yonas Howay yang sampai saat ini belum jelas keberlanjutannya pasca menggugat di pengadilan (KompasTV Sorong, 2022). Hal ini pula yang mengakibatkan konflik terjadi karena persaingan antar kelompok yang melibatkan perbedaan identitas dan suku sehingga diramu dalam kepentingan politis. Hal itu terlihat pada pernyataan Mantan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau yang menyebut bahwa hanya tokoh yang layak mencalonkan diri sebagai calon gubernur adalah orang yang secara identitas berasal dari suku besar di Papua Barat

Daya dan memiliki kontribusi dalam pembentukan provinsi baru ini (Tribun Papua Barat, 2023). Sehingga pernyataan ini melahirkan konflik atas nama identitas dan menjadi salah satu penyebab konflik yang berdampak pada aspek lainnya yang lebih luas. Hal ini selaras dengan penelitian Tue Mali tahun 2018 yang menemukan otonomi daerah digunakan sebagai entitas yang otoriter dan digunakan sebagai alasan berkedok untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga melanggengkan kekuasaannya (Tue Mali, 2018).

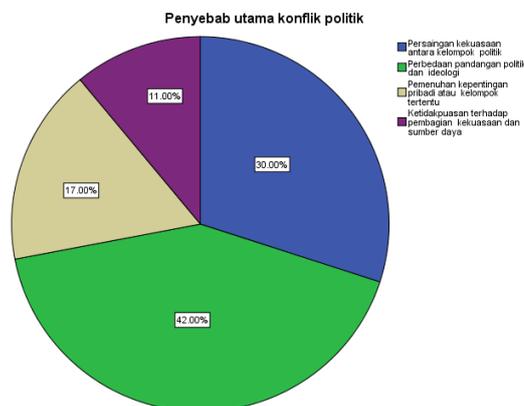


Diagram 2. Penyebab Utama Konflik Politik

Sumber : Olahan data primer, 2023

Pada teori penyebab konflik dijelaskan bahwa salah satu penyebab konflik adalah identitas yang membedakan kelompok yang satu dengan lainnya (Fisher, 2002). Yang lebih parah lagi jika kelompok yang satu merasa superior dengan kelompok lainnya, apalagi dalam konteks di tanah Papua yang masih terasa polarisasi antara Orang Asli Papua (OAP) dengan bukan asli sehingga hal ini menciptakan batas-batas politis yang jelas dan konflik politik akan tetap terjaga karena pandangan ini. Sementara pada penyebab selanjutnya konflik terjadi karena pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok serta ketidakpuasan terhadap pembagian sumber daya, termasuk jabatan yang saat ini masih dalam proses melengkapi administrasi pemerintahan baru yang dibentuk sehingga potensi jual beli jabatan ada. Hal ini selaras dengan penelitian Hanantyo Sri Nugroho tahun 2018 menemukan bahwa Konflik dan praktik dinasti politik telah memunculkan perubahan dalam bentuk orang-orang berpengaruh di tingkat lokal yang mencari kekuasaan di dalam era demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah (Nugroho, 2018).

Sehingga pada persiapan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Papua Barat daya tahun 2024 nantinya akan menemui beberapa konflik, utamanya pada elit yang berebut kekuasaan dan mencoba menancapkan kekuasaan baru di wilayah otonomi baru. Pertarungan bebas nanti ini akan melahirkan konflik politik dan semoga saja tidak melebar ke konflik sosial dengan eskalasi yang lebih besar. Pada Kontestasi dalam pemilihan gubernur atau walikota pada 2024 di Provinsi Papua Barat Daya diperkirakan akan menjadi lebih sengit. Hal ini disebabkan oleh perhelatan demokrasi lima tahunan pertama di provinsi ke-38 Indonesia ini yang diperkirakan akan didominasi oleh dinamika politik identitas. Dalam pandangan umum, ada tanda-tanda bahwa beberapa pihak mulai mempermainkan isu-isu identitas di hadapan masyarakat Papua Barat Daya, dan ini adalah hal yang sangat sensitif. Dinamika politik identitas mulai terasa dengan adanya kehadiran oknum

tertentu di Sorong Raya yang mengatasnamakan kelompok tertentu (Tribun Sorong, 2023). Selaras dengan hal tersebut, penelitian Suhardiman Syamsu (2020) menemukan bahwa pemekaran daerah digunakan sebagai strategi politik dalam kampanye untuk menarik dukungan elektoral. Para elit politik bersaing untuk memenangkan suara pemilih sebagai bagian dari praktek politik mereka. Hal ini terjadi di Papua Barat Daya karena ada beberapa tokoh politik yang bermanuver dalam memproklamasikan diri sebagai calon pemimpin dan hanya orang asli yang bisa menduduki jabatan tersebut sehingga melahirkan konflik identitas yang dimulai dari elit politik.

Pada teori hubungan masyarakat dari Fisher (2002: 7-8) yang mengatakan konflik dipicu oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok dalam masyarakat.. Di tanah Papua yang sangat multicultural hal itu dimungkinkan terjadi. Menurut laporan dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), terdapat sekurang-kurangnya 53 insiden kekerasan dan konflik bersenjata yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 47 kasus dilaporkan terjadi di Provinsi Papua, sementara enam kasus lainnya terjadi di Provinsi Papua Barat. Insiden konflik paling mematikan terjadi di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 24 Januari 2022, yang melibatkan 19 korban jiwa. Menurut kepolisian, peristiwa ini dimulai karena adanya kesalahpahaman antara dua kelompok warga sipil yang kemudian berujung pada konflik tersebut (Santina, 2023).

Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam disimpulkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi pemicu konflik politik yang disebabkan oleh perubahan yang signifikan dalam tata kelola daerah serta redistribusi kekuasaan yang bersumber dari polarisasi yang terjadi di masyarakat atas perbedaan sosial dan budaya di masyarakat. Lalu penyebab konflik politik lainnya adalah perbedaan pandangan politik dan ideologi yang berbasis pada pertentangan antara beberapa elit partai politik untuk merebut kekuasaan dan pengaruh apalagi menjelang pemilihan kepala daerah nantinya.

2. Dampak konflik politik

Konflik politik menciptakan dampak terhadap masyarakat. Konflik ini melahirkan keresahan dan kecemasan terhadap situasi dan kondisi masyarakat, tetapi dalam skala besar konflik politik bisa berdampak pada aspek yang lebih besar apalagi jika dikaitkan dengan politik identitas yang bernuansa SARA (Suku, Agama dan Ras) serta terhambatnya penetapan kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan pernyataan YK (42 tahun) pada wawancara 21 Agustus 2023 yang mengatakan:

Konflik politik ini sangat meresahkan karena membawa-bawa identitas, apalagi kita ketahui bersama Kota Sorong ini sangat multi budaya dan agama sehingga dengan adanya konflik politik ini sangat mengancam kedamaian warga. Saya melihat hal itu harus dicegah dan peran Bawaslu dan pemerintah dalam mengawasi hal tersebut jangan sampai menjadi bola liar dan menciptakan konflik yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut yang ditakutkan dari konflik politik adalah isu yang sensitif sehingga diperlukan upaya bersama dalam mengatasi hal tersebut. Selanjutnya konflik ini juga berdampak terhambatnya proses pengambilan keputusan bahkan meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini terlihat pada diagram berikut:

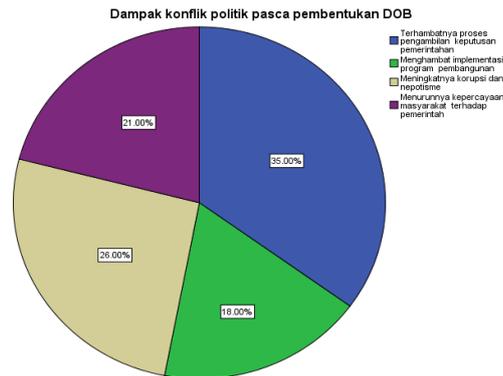


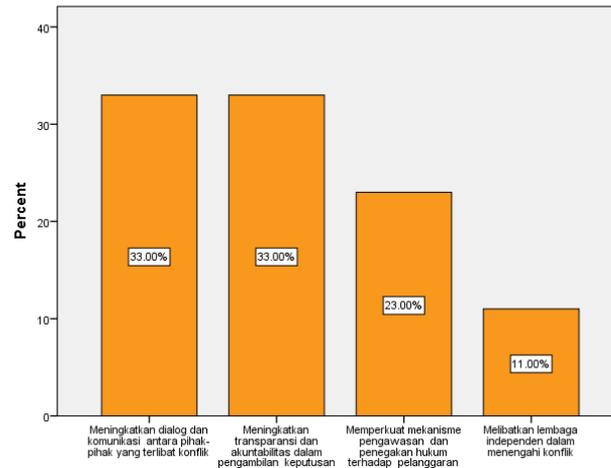
Diagram 3. Dampak Konflik Politik

Sumber : Olahan data primer, 2023

Berdasarkan diagram terlihat dampak konflik politik pasca pembentukan daerah otonomi baru adalah terhambatnya proses pengambilan keputusan pemerintah karena terjadinya tarik ulur kebijakan yang direncanakan dengan kepentingan, termasuk pada penetapan ibu kota provinsi yang akhirnya memilih Kota Sorong menjadi ibu kota provinsi setelah muncul isu batal. Sementara dampak konflik selanjutnya meningkatkan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari kasus korupsi yang terjadi seperti korupsi beras dan gula pasir yang menyebabkan kerugian negara senilai 1,9 M (Detiksulsel, 2023), kasus korupsi Alat Tulis Kantor (ATK) (IndonesiaSatu, 2023), Korupsi sebesar 28 Miliar Pembangunan Stadion Bewela Kota Sorong (Sorong Pos, 2023). Bahkan pada September 2023 kasus korupsi yang menyeret Sekretaris DPD Golkar Papua Barat Daya, Selviana Wanma atas dugaan korupsi kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dengan Kerugian negara Rp1,3 Miliar (Jubi.id, 2023). Dari beberapa kasus korupsi tersebut terlihat penyalahgunaan wewenang, apalagi didukung oleh jabatan strategis sehingga memuluskan jalan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, konflik politik ini melahirkan kondisi tidak stabil secara politik dan sosial dalam masyarakat. Dari hal tersebut diperlukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik politik tersebut sehingga tidak menjadi hal yang serius. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan upaya yang paling rasional yang dilakukan Dari pemerintah dengan meningkatkan dialog lintas sektor serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1. Berdasarkan grafik tersebut terlihat upaya pemerintah mengatasi konflik politik pasca pembentukan daerah otonomi baru dengan meningkatkan dialog dan komunikasi. Hal itu sesuai dengan pernyataan YK (42 tahun) pada wawancara 21 Agustus 2023 yang mengatakan:

Kami mengkomunikasikan terkait hal teknis dan sangat penting dilakukan karena pasca provinsi ini terbentuk terjadi tarik ulur dalam penentuan ibu kota provinsi yang melahirkan konflik dari berbagai kepala daerah yang merasa berhak menentukan lokasi, sehingga dalam dialog dan komunikasi tersebut yang berhak menjadi ibu kota dengan pertimbangan kelengkapan infrastruktur dan aksesibilitas percepatan pelayanan masyarakat dipilahlah Kota Sorong.



Grafik 1. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Politik

Sumber : Olahan data primer, 2023

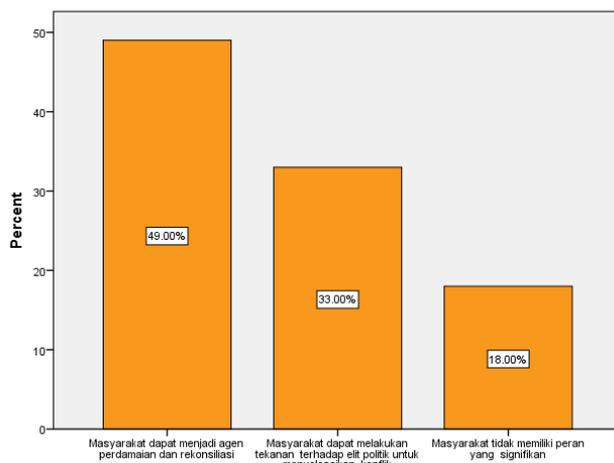
Bahkan hal itu dikonfirmasi oleh AP (38 tahun) pada wawancara 23 Agustus 2023 yang mengatakan upaya pemerintah sangat intens dalam komunikasi antar beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan strategis seperti kelompok adat, partai politik dan pemuda. Konflik politik ini dapat dicegah dan diminimalisir dengan komunikasi intens dan mendengar aspirasi dari beberapa kelompok yang mewakili golongan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan konflik politik ini masih bisa diatasi karena masing-masing kelompok menahan diri yang meskipun terjadi psywar di media sosial dan pernyataan media massa yang berbau politik identitas tetapi dengan dialog dan silaturahmi akan mencairkan suasana. Saya kira hal itu penting dilakukan sehingga elit ini memberikan contoh yang baik ke masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dengan dialog dan komunikasi yang intensif yang dilakukan mampu meredam konflik sehingga tidak bergejolak, apalagi pasca pembentukan daerah otonomi baru ini mempersiapkan kelengkapan infrastruktur pemerintahan. Dengan konflik politik ini masing-masing kelompok menegaskan kekuatannya, menunjukkan eksistensinya dan menjadi batas penegas dan pembeda dengan kelompok politik lainnya. Sehingga konflik tidak selalu bersifat negatif, ada sisi positif yang dapat diterima, seperti peningkatan partisipasi politik dan peningkatan minat dalam berpolitik pasca pembentukan daerah otonomi baru yang dampaknya meningkatkan animo masyarakat untuk berpolitik. Hal ini selaras dengan pandangan Coser (Poloma,2010: 108) menjelaskan fungsi konflik dapat memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya, sehingga kelompok berusaha memancing antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar supaya mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Selanjutnya upaya dalam menangani konflik politik ini dengan menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting sehingga tidak menciptakan prasangka buruk terhadap pemerintahan yang baru dibentuk. Koordinasi antar semua stakeholder sangat penting dilakukan dalam mempersiapkan kepemimpinan baru. Hal itu sesuai dengan pernyataan YK (42 tahun) pada wawancara 21 Agustus 2023 yang mengatakan salah satu hal penting kita dari awal harus transparan. Pejabat

sementara (PJS) Gubernur telah melakukan lelang jabatan pada bulan Juli untuk dipersiapkan mengisi jabatan strategis, juga mengatur alat kelengkapan dinas-dinas untuk mendukung pemerintah dalam bekerja mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya.

Pada konflik politik selanjutnya dibutuhkan peran masyarakat dalam menjadi patron untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan. Salah satu hal penting yang ditemukan dengan konflik politik yang terjadi seharusnya masyarakat menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi. Hal ini menjadi penting dan 49 persen responden mengatakan hal demikian sesuai dengan grafik berikut:



Grafik 2. Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Politik

Sumber : Olahan data primer, 2023

Pada grafik diatas peran masyarakat paling efektif dengan menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi, apalagi dalam kontek konflik politik seharusnya masyarakat harus meningkatkan pendidikannya dan melihat kondisi dan mulai melihat tokoh atau pemimpin mana yang layak untuk Papua Barat Daya secara umum. Peran kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku sangat penting sehingga stabilitas keamanan terjaga. Yang tidak kalah penting peran masyarakat memberi tekanan terhadap elit politik untuk menghindari politik identitas. Hal itu sesuai dengan pernyataan WH (40 tahun) pada wawancara 24 Agustus yang mengatakan:

Peran masyarakat yang pro aktif dalam menjadi penekan sehingga konflik politik ini tidak menjadi bahan bakar untuk meningkatkan isu yang lebih sensitif dalam kontestasi politik di tanah Papua. Upaya meningkatkan pemahaman politik masyarakat dari penyelenggaraan, dari partai dan pemerintah menjadi hal krusial sehingga pemerintah tidak sibuk mengurus hal yang tidak substansial dan fokus mempersiapkan pemerintahan baru.

Berdasarkan pernyataan tersebut peran masyarakat sangat penting dalam partisipasinya untuk menjadi alat penekan kepada kelompok elit untuk tidak mengganggu fokus pemerintah dalam mempersiapkan pemerintahan baru. Dengan kekuatan akar rumput dari berbagai kelompok budaya dan agama, apalagi di Kota Sorong sebagai kota yang sangat multikultural sangat penting dalam meminimalisir konflik tidak membesar. Sehingga dengan dampak konflik politik tersebut membuat terhambatnya proses pengambilan keputusan pemerintah karena terjadinya tarik ulur kebijakan yang direncanakan dengan kepentingan. Upaya yang dilakukan

pemerintah dengan dialog dan komunikasi yang intensif yang mampu meredam konflik sehingga tidak berkejolak lebih besar. Sementara aspek penting selanjutnya dengan peran masyarakat sebagai penekan dan agen perdamaian menjadi sangat penting untuk merespon konflik politik yang akan terus terjadi saat ini dan menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

3. Perubahan struktur dan kondisi pemerintahan

Otonomi baru merupakan hak yang diberikan kepada penduduk suatu daerah untuk mengelola dan mengatur urusan-urusan mereka sendiri, sambil tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Muntoha,2004: 1). Pada otonomi tersebut seharusnya tidak jauh dari tujuan utama otonomi sehingga meningkatkan pelayanan, memperkuat pengambilan keputusan dan meningkatkan pembangunan di daerah. Hal itu sesuai dengan diagram berikut:



Diagram 4. Tujuan Utama Pembentukan DOB

Sumber : Olahan data primer, 2023

Berdasarkan diagram tersebut tujuan utama pembentukan daerah otonomi baru untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat yang selama ini tidak terlayani secara maksimal mendapatkan perbaikan. Dengan layanan publik yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan otonomi baru juga dapat mempercepat pembangunan, apalagi di Tanah Papua masih belum maksimal pembangunannya. Hal itu sesuai dengan penelitian Karmila Sinen tahun 2022 yang mengatakan pembentukan daerah otonomi baru mampu mempercepat pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kecepatan pelayanan pemerintahan dimana subjek utamanya adalah pelayanan orang asli papua (Sinan, Ningrum, & Kabes, 2022). Hal itu didukung oleh pernyataan AP (38 tahun) pada wawancara 23 Agustus 2023 yang mengatakan dengan otonomi ini masyarakat dapat terlayani dengan cepat, mampu meningkatkan akselerasi pembangunan karena dengan adanya otonomi baru, pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seringkali mengakibatkan perubahan yang substansial dalam struktur dan kondisi pemerintahan di wilayahnya. Perubahan tersebut dapat meliputi berbagai bidang, seperti struktur pemerintahan, kebijakan, tata kelola, serta distribusi kekuasaan. Pasca dibentuknya daerah otonomi baru seharusnya terjadi akselerasi pembangunan yang lebih cepat, pembangunan yang sedikit merata yang meskipun dari kondisi pembangunan di

Kota Sorong, Provinsi Papua Barat daya masih tertinggal dari daerah lain. Hal itu terlihat pada diagram berikut:

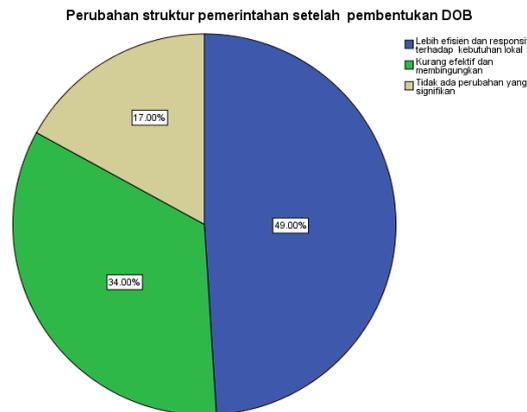


Diagram 5. Perubahan Struktur Pemerintahan Setelah Pembentukan DOB

Sumber : Olahan data primer, 2023

Berdasarkan penelitian ditemukan perubahan struktur setelah pembentukan daerah otonomi baru lebih efisien terhadap kebutuhan lokal, utamanya orang asli papua, tetapi masih ada yang mengatakan belum efisien bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Dalam tinjauan teoritis tujuan utama dalam pembentukan daerah otonomi baru adalah tujuan politik, administrative dan ekonomi (Sri Rahayu, 2018). Dalam konteks di tanah papua, pembentukan otonomi baru ini lebih kepada tujuan politik untuk meredakan konflik yang terjadi semenjak integrasi papua pada tahun 1969 sampai saat ini. Dengan dalih ini, pemerintah pusat telah mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif serta untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dengan pengesahan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid II, yang merupakan langkah pemerintah dalam mencapai konsensus dan mencari solusi atas konflik di Papua (Suriadin, 2022). Sehingga berdasarkan hal tersebut, tujuan ekonomi dan administrative belum dilakukan. Selanjutnya bagaimana kondisi pemerintahan pasca pembentukan daerah otonomi baru dapat dilihat pada diagram enam.

Berdasarkan diagram kondisi pemerintahan pasca pembentukan daerah otonomi baru terlihat ada perbaikan, meskipun secara umum responden mengatakan kondisinya sama, bahkan belum ada perbaikan. Hal itu terjadi karena pemerintah sekarang sementara melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur pemerintahan sehingga untuk saat ini kondisi pemerintahan belum stabil. Dalam tujuan desentralisasi atau otonomi daerah, pembentukan wilayah baru ini seharusnya mampu menciptakan perubahan kondisi pemerintahan yang lebih baik, mampu melahirkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Menurut Jim Ife (Noor,2012: 8) desentralisasi melahirkan pemerintahan yang lebih demokratis, lebih akuntabilitas, peningkatan edukasi, dan kewajiban, dengan tujuan menerapkan strategi yang mempromosikan keadilan sosial bagi masyarakat.

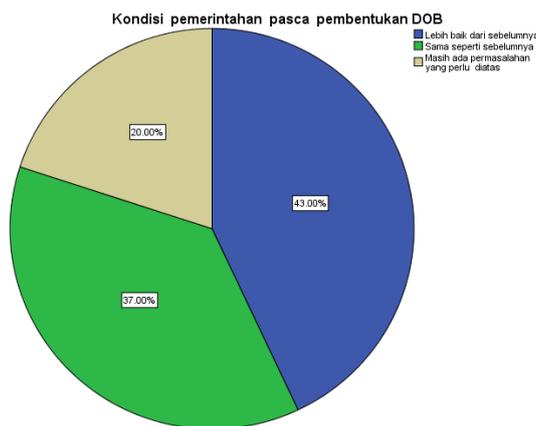


Diagram 6. Kondisi Pemerintahan Pasca Pembentukan DOB

Sumber : Olahan data primer, 2023

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pembentukan daerah otonomi baru untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat yang selama ini tidak terlayani secara maksimal mendapatkan perbaikan. Selanjutnya pembentukan otonomi baru ini lebih kepada tujuan politik untuk meredakan konflik sehingga tujuan secara ekonomi dan administrasi belum menjadi fokus utama. Lalu kondisi pemerintahan pasca pembentukan daerah otonomi baru sedang dalam perbaikan. Hal itu terjadi karena pemerintah sekarang sementara melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur pemerintahan sehingga untuk saat ini kondisi pemerintahan belum stabil.

E. KESIMPULAN

Pembentukan Daerah Otonomi Baru menjadi pemicu konflik politik yang disebabkan perubahan tata kelola daerah serta redistribusi kekuasaan yang bersumber dari polarisasi yang terjadi di masyarakat atas perbedaan sosial dan budaya di masyarakat. Penyebab konflik politik lainnya adalah perbedaan pandangan politik dan ideologi yang berbasis pada pertentangan antara beberapa elit partai politik untuk merebut kekuasaan. Dampak konflik politik membuat terhambatnya proses pengambilan keputusan pemerintah karena terjadinya tarik ulur kebijakan yang direncanakan dengan kepentingan serta meningkatkan potensi konflik identitas. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan dialog dan komunikasi dan peran masyarakat sebagai penekan dan agen perdamaian menjadi sangat penting untuk menangani konflik politik. selanjutnya belum ada perubahan struktur dalam pemerintahan karena kebijakan otonomi baru ini lebih kepada tujuan politik untuk meredakan konflik sehingga tujuan secara ekonomi dan administrasi belum menjadi fokus utama. Lalu kondisi pemerintahan dalam proses perbaikan karena pemerintah baru sedang melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur sehingga untuk saat ini kondisi pemerintahan belum stabil.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sorong sebagai tempat melakukan pengabdian sehingga mampu berkolaborasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dalam skema penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2023. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada semua tim

yang bekerja sama dalam melakukan pengumpulan data, beserta responden penelitian yang meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Papua Barat. (2023, Juli 17). *Profil Kemiskinan Papua Barat Maret 2023*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://papuabarot.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/800/persentase-penduduk-miskin-papua-barat-maret-2023-mengalami-penurunan-menjadi-20-49-persen.html>
- Burhan, R. (2020). Pemekaran Sebagai Arena Konflik Ekonomi : Studi Pemekaran Pada Luwu Raya. *Government: Ilmu Pemerintahan*, 13, 24-33. doi:<https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9613>
- Detiksulsel. (2023, Juli 21). *Eks Kepala Gudang Bulog Sorong Jadi Tersangka Korupsi Beras-Gula Rp 1,9 M*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6834955/eks-kepala-gudang-bulog-sorong-jadi-tersangka-korupsi-beras-gula-rp-19-m>
- Duverger, M. (2015). *Sosiologi Politik, Cetakan Ke-15, Terjemahan Daniel*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fisher, S. (2002). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia.
- Habib, A. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial*. IAIN Mataram.
- Haikal, F. (2019). Model Resolusi Konflik Pemekaran Nagari. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 98-114. doi:10.25077/jsa.5.2.98-114.2019
- Hidayat, I. (2009). *Teori-teori Politik*. Setara Press.
- IndonesiaSatu. (2023, Juli 23). *Ketua Repdem Papua Barat Desak Kejari Sorong Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi ATK*. Retrieved Agustus 21, 2023, <https://indonesiasatu.co/detail/ketua-repdem-papua-barat-desak-kejari-sorong-tuntaskan-kasus-dugaan-korupsi-atk>
- Jubi.id. (2023, September 14). *Sekretaris DPD Golkar Papua Barat Daya ditahan di Lapas atas dugaan korupsi*. Retrieved September 17, 2023, from <https://jubi.id/domberai/2023/sekretaris-dpd-golkar-papua-barat-daya-ditahan-di-lapas-atas-dugaan-korupsi/>
- Kompas. (2023, Juni 20). *Tahun Ini Sarpras Papua Barat Daya Dibangun, Termasuk Renovasi Stadion Wombik*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://www.kompas.tv/regional/418219/tahun-ini-sarpras-papua-barat-daya-dibangun-termasuk-renovasi-stadion-wombik>
- KompasTV Sorong. (2022, Juli 22). *Calon Ketua DPC Demokrat Di Sorong Cari Keadilan*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://www.kompas.tv/regional/311895/calon-ketua-dpc-demokrat-di-sorong-cari-keadilan>
- Muksin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270-281. doi:10.14710/jiip.v6i2.11817
- Muntoha. (2004). *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Safiria Insania Press.

- Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287. doi:10.31078/jk1025
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Nugroho, H. S. (2018). Menalar Posisi Elit Daerah Di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1). doi:https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1989
- Petronela, Z., & Lrina, B. (2009). "Decentralization And Local Autonomy - Local Public Management Defining Principles ". *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 2(1), 805-812. doi:10.29302/oeconomica.2009.11.2.22
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, M. (2018). *Pengantar Filsafat Sosial*. Lekkas.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan konflik politik*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Santina, F. E. (2023). *Ini Jumlah Korban Jiwa Akibat Kasus Kekerasan hingga Konflik Bersenjata di Papua Sepanjang 2022*. Retrieved Agustus 21, 2023, Kata Data Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-jumlah-korban-jiwa-akibat-kasus-kekerasan-hingga-konflik-bersenjata-di-papua-sepanjang-2022>
- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6, 45-54. doi:https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844
- Sorongpos. (2023, Februari 23). *Diduga Kuat Pembangunan Stadion Bewela Kota Sorong, Terindikasi Korupsi Sebesar Rp 28 Miliar*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://sorongpos.com/2023/02/14/diduga-kuat-pembangunan-stadion-bewela-kota-sorong-terindikasi-korupsi-sebesar-rp-28-miliar/>
- Sri Rahayu, A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. CV Alfabeta.
- Surbakti, R. (2001). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 86-97. doi:10.32734/politeia.v14i2.8404
- Sutopo, D. S., & Shabrina, D. (2022). Spektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 57-68. doi:10.25077/jsa.8.1.57-68.2022
- Syamsu, Suhardiman, Burhan, Reksa, & Haliq, Ade Irma Surani. (2020). Pemekaran Daerah Luwu Raya Sebagai Isu Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 267-280. doi:10.22219/sospol.v6i2.12898
- Tribun Papua Barat. (2023, Juli 4). *Tanggapi Lambert Jitmau, Abdul Wahab Warwey: Semua Tokoh Papua Barat Daya Berhak Jadi Calon Gubernur*. (T. Sutomonaio, Editor) Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://papuabarat.tribunnews.com/2023/07/04/tanggapi-lambert-jitmau-abdul-wahab-warwey-semua-tokoh-papua-barat-daya-berhak-jadi-calon-gubernur>

- Tribun Sorong. (2023, Juli 23). *Pilgub Papua Barat Daya Diprediksi Sengit, Pengamat Politik Sebut Didominasi Politik Identitas*. Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://sorong.tribunnews.com/2023/07/06/pilgub-papua-barat-daya-diprediksi-sengit-pengamat-politik-sebut-didominasi-politik-identitas>
- Tue Mali, F. X. (2018). Konflik Tanah Di Daerah Otonom Baru (Dob) Studi Konflik Tanah Pembangunan Kantor Dprd Di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sociae Polites*, 18(01), 39-56. doi:10.33541/sp.v18i01.754